

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran adalah seseorang individu atau sekelompok orang yang termasuk dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan namun belum menemukannya terkait sesuai ketentuan upah yang diharapkan (Sukirno, 2006). Menurut Mankiw (2000) seseorang dinyatakan menganggur apabila dia sedang tidak bekerja untuk sementara waktu, sedang mencari pekerjaan atau sedang menunggu waktu mendapatkan pekerjaan. Sulitnya mengendalikan tingkat pengangguran tercantum sebagai salah satu permasalahan utama yang dialami oleh setiap negara termasuk negara berkembang seperti Indonesia, perihal ini bisa memiliki dampak yakni apabila banyaknya pengangguran dapat mengakibatkan masyarakat kehilangan pendapatan. Oleh karena itu akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga mampu mengurangi tingkat kesejahteraan serta menurunkan standar hidup masyarakat.

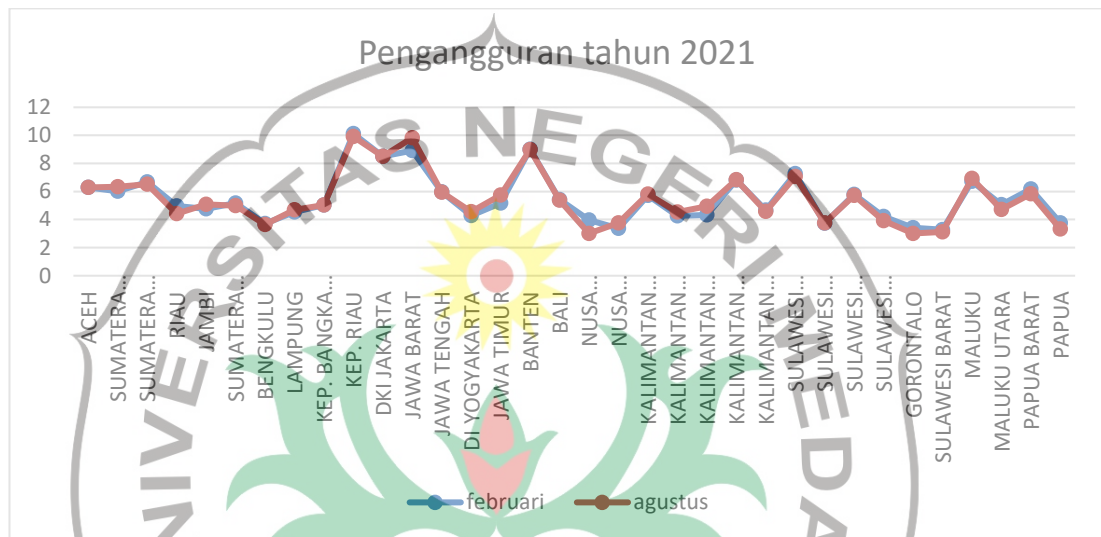
Pada dasarnya pengangguran merupakan permasalahan yang sangat rumit karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak aspek yang silih berorientasi, sehingga membentuk pola yang tidak gampang diuraikan. Jika tingkat pengangguran berada pada kisaran 4% maka tingkat pengangguran itu dianggap normal, sementara Indonesia memiliki rata-rata tingkat pengangguran 5%. Oleh karena itu pengangguran di Indonesia terhitung cukup tinggi sehingga dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat, untuk itu perlunya pembenahan dari campur pemerintah, perusahaan serta masyarakat.

Indikator yang digunakan untuk melihat tingkat pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka, yang dihitung dengan membagi jumlah total individu yang menganggur dengan angkatan kerja kemudian dikali 100 hingga memiliki satuan persen. Tingkat pengangguran terbuka merupakan permasalahan karena penggunaan sumber daya manusia yang belum sempurna menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya konsumsi karena tingkat upah yang tidak fleksibel menyebabkan daya beli masyarakat menjadi turun. Kondisi buruk inilah yang menyebabkan munculnya masalah pengangguran karena kurangnya permintaan tenaga kerja. Jika permasalahan pengangguran tidak segera dikurangi, maka dapat menyebabkan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial (Badan Pusat Statistika,2020).

Pengangguran yang tinggi masuk kedalam permasalahan ekonomi serta berdampak pada masalah sosial. Apabila tidak segera diatas tingginya angka pengangguran akan mengakibatkan pada peningkatan kriminalitas, penurunan pendapatan nasional, konflik sosial, gangguan kesehatan mental, hingga kemiskinan. Untuk itu perlunya mengetahui faktor apa yang sangat mempengaruhi tingkat pengangguran dan bagaimana variabel tersebut mempengaruhi tingkat pengangguran. Pengangguran di Indonesia Menurut data Badan Pusat Statistika dari Tahun 2018-2022 Tingkat pengangguran terbuka terbesar di Indonesia adalah sejumlah 9,77 juta jiwa pada tahun 2020, atau 7,07% dari total populasi. Tingginya angka Pengangguran ini bukan hanya menjadi masalah negara namun juga menjadi masalah di berbagai daerah termasuk juga di Provinsi. Maka berikut ini merupakan perbandingan angka pengangguran di setiap provinsi di Indonesia tahun 2021

Gambar 1. 1

Tingkat Pengangguran Terbuka Di Setiap Provinsi Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2021

Menurut data pengangguran antar provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau mencapai 10.12% pada Februari 2021 dan mencapai 9.91% pada Agustus 2021 sehingga membuat provinsi Kepulauan Riau berada pada peringkat pertama tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau yang beberapa tahun belakangan ini tingkat pengangguran terbukanya tertinggi mengalami fluktuasi namun cenderung naik, hal ini disebabkan juga karena ditimbulkan oleh beberapa faktor lain, yang diantaranya tingkat partisipasi Angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya dan luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak begitu luas ditambah lagi dengan wilayahnya yang berbentuk kepulauan dan jauh dari pemerintahan pusat, yang menjadikan berkurangnya permintaan tenaga kerja. Berkurangnya permintaan tenaga kerja juga disebabkan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau belum memadai serta tersisih dalam kompetisi mencari kerja dengan calon pekerja provinsi lain untuk mendapatkan pekerjaan, hal itu ditinjau dari pendidikan yang masih rendah.

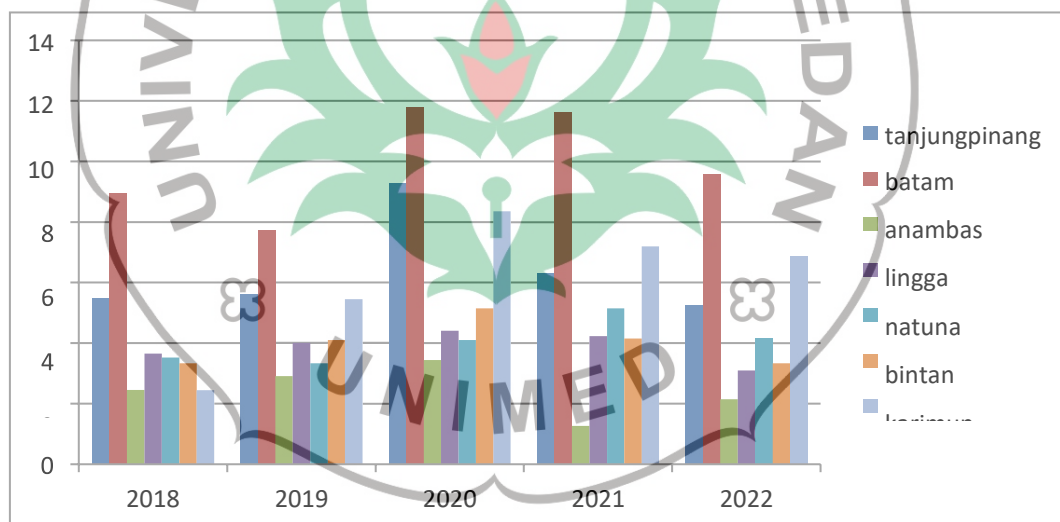
Provinsi Kepulauan Riau juga dikenal sebagai provinsi yang memiliki jalur lintas perdagangan yang bagus karena letak wilayahnya yang dekat dengan wilayah Singapura sehingga dikatakan kota industri karena banyaknya investor asing yang menanam modal untuk berinvestasi, adanya Kabupaten Karimun dengan alam yang diunggulkan berupa bahan tambang, Kabupaten Natuna sebagai penghasil minyak serta gas yang melimpah, Kota Tanjungpinang sebagai kota dengan keunggulan sektor jasa, industri serta pertanian, Kabupaten Anambas dengan wisata dan hasil laut yang melimpah serta Kabupaten Lingga sebagai penghasil sumber daya laut. Pada dasar teorinya tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah mampu mengurangi tingkat pengangguran, karena tingginya pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga bertambahnya permintaan barang dan jasa dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta mengurangi tingkat pengangguran.

Namun yang terjadi di Kepulauan Riau sebaliknya, tingginya pertumbuhan ekonomi juga diiringi dengan tingginya pengangguran. Selain itu tingkat pendidikan yang terlihat cukup rendah di Kepulauan Riau menjadi permasalahan karena mampu meningkatkan angka pengangguran di Kepulauan Riau. Hal ini dapat terjadi karena dalam suatu pekerjaan seperti perusahaan ataupun instansi memiliki salah satu syarat yakni pendidikan sebagai tanda memiliki keterampilan serta pengetahuan, untuk itu pula pendidikan yang rendah menjadi penyebab pengangguran di Kepulauan Riau. Selain itu upah yang dikatakan cukup tinggi di Kepulauan Riau terbukti dengan hal ini dapat menimbulkan minat para pengangguran untuk mencari kerja karena dapat meningkatkan standar hidup.

Namun di sisi pengusaha justru semakin tinggi upah akan semakin sedikit tenaga kerja yang digunakan sehingga meningkatkan pengangguran. Maka dari itu tingkat pengangguran di Kepulauan Riau terus bertambah dari tahun ke tahunnya. Maka dari itu fenomena tersebut yang menjadikan peneliti mengangkat lokasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 1. 2

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022



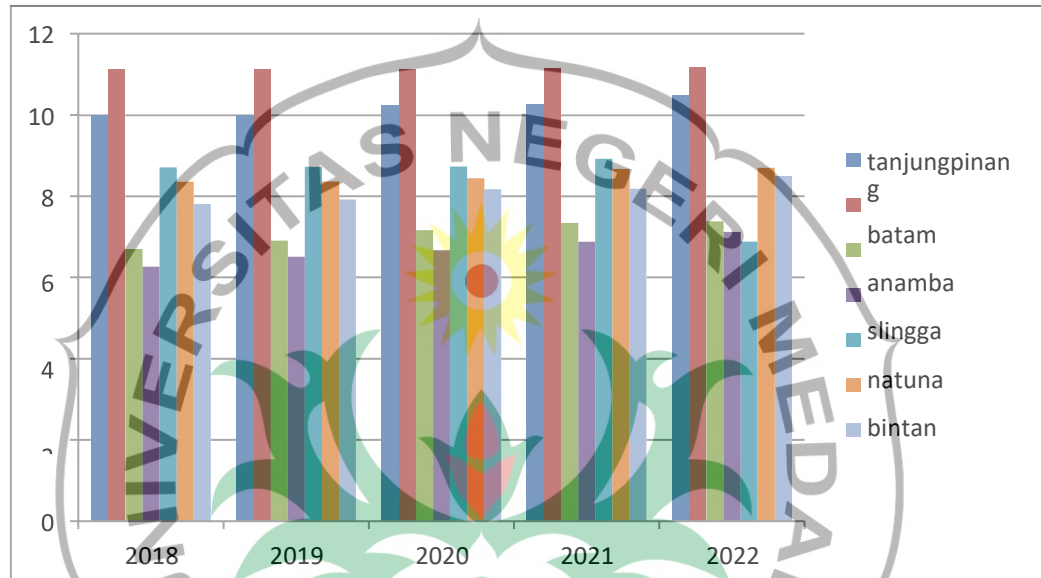
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2022

Provinsi Kepulauan Riau mempunyai 7 kabupaten/kota yang terbagi menjadi 2 kota ialah Tanjungpinang dan Batam dan 5 kabupaten ialah Kepulauan Anambas, Bintan, Lingga, Karimun dan Natuna. yang mana masing-masing daerah mempunyai tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang berbeda pada setiap kabupaten/kota. Dari grafik dapat diketahui TPT di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau mengalami kondisi fluktuatif, adapun Kota Batam sebagai wilayah yang nilai rata-rata tingkat pengangguran terbukanya paling tinggi dan Kabupaten Anambas dengan rata-rata tingkat pengangguran terbukanya terendah.

Dari grafik di atas dapat dilihat tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau, tingkat pengangguran terbuka tersebut relatif tinggi. Pada tahun 2020, Kota Batam memiliki tingkat pengangguran tertinggi di provinsi ini, dengan 11%. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Anambas berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan tingkat pengangguran terendah, tepatnya pada tahun 2021 hanya 1% bahkan dikatakan jauh dibawah tingkat pengangguran nasional di Indonesia.

Adapun faktor utama yang mempengaruhi tingkat pengangguran yaitu pendidikan. Sekolah merupakan tempat untuk meningkatkan pengetahuan dan juga didukung oleh kemajuan teknologi (Zahro et al., 2021). Investasi di bidang pendidikan adalah investasi di bidang *humancapital* sehingga memperoleh peluang kerja yang lebih luas dan produktivitasnya dapat lebih tinggi, maka untuk dapat mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membuat pilihan terbaik antara memulai karir segera dan pergi ke perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan sebelum memulai karir atau membutuhkan pertimbangan baik potensi pendapatan yang akan terima di masa depan. Selanjutnya fakta menunjukkan bahwa menghadiri kuliah akan menghabiskan lebih banyak uang daripada mendapatkan ijazah sekolah menengah atas. Untuk itu adanya indikator penentu pendidikan formal pada penelitian ini adalah rata-rata lama sekolah. Pentingnya penduduk dalam menempuh pendidikan minimal dua belas tahun diharapkan dapat mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, maka dari itu berarti pendidikan berpengaruh terhadap Pengangguran. Berikut ini menunjukkan grafik RLS pada Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 1. 3

Rata- rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2022

Pada tahun 2022, rata-rata waktu yang dihabiskan di sekolah pada Provinsi Kepulauan Riau adalah 10,37 tahun atau sekitar kelas 2 sekolah menengah atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kota Batam memiliki rata-rata lama sekolah homogen terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, diikuti oleh Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, dan Kepulauan Anambas serta homogen lama sekolah terendah berada di Kabupaten Lingga. Sebagai contoh kabupaten natuna mengalami kenaikan pendidikan namun diiringi juga dengan kenaikan pengangguran yang dimana hal tersebut tidak berkesesuaian pada teori human capital, yang mengasumsikan bahwa Pendidikan mampu meningkatkan kualitas dan produktifitas seseorang sehingga diharapkan mampu memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi pekerja. Tetapi hal ini tak sesuai dengan data yang menampilkan bahwa Kabupaten Anambas justru memiliki lebih rendah tingkat pengangguran daripada Kabupaten Karimun yang pendidikannya lebih tinggi.

Pendidikan bisa menjadikan masyarakat mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Keadaan ini disebabkan karena penduduk yang mampu membaca dan menulis bahkan yang sudah menempuh pendidikan pun belum memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga menambah jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam penelitian terdahulu oleh Nelva Siskawati, dkk (2020) menunjukkan hasil bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh positif terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka, sedangkan dalam penelitian terdahulu oleh Dian Priastiwi dan Herniwati Retno Handayani (2019) menunjukkan hasil bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap variabel Tingkat pengangguran terbuka.

Sementara itu upah juga diduga kuat mempengaruhi jumlah pengangguran. Upah pekerja adalah jumlah yang mereka bayarkan menjadi balas jasa merampun pekerjaan sesuai dengan perjanjian pekerjaan dan kekakuan upah menjadi salah satu penyebab pengangguran (Mankiw, 2018). Upah menyatakan bahwa Penetapan Tingkat pengangguran aktual dipengaruhi oleh upah minimum. Adapun indikator yang digunakan untuk melihat Tingkat upah pada penelitian ini adalah upah minimum kabupaten, upah minimum kabupaten merupakan upah yang ditentukan oleh walikota dan upah minimum provinsi di tentukan oleh gubernur. Upah juga dapat mempengaruhi naik turunnya pengangguran di suatu daerah, Upah mampu memberikan hubungan positif ataupun negatif pada tingkat pengangguran.

Apabila tenaga kerja sudah menerima upahnya dengan minimal tertentu maka akan enggan untuk bekerja apabila besaran upah tidak sesuai minimal upah,

Untuk itu apabila tenaga kerja memperoleh semakin tinggi upah maka akan semakin mampu menaikkan standar kehidupan dan untuk itu semakin tinggi pula minat dalam mencari pekerjaan dengan keterampilan atau kualitas yang tinggi. Pekerja enggan untuk menerima upah yang lebih rendah atau tidak sesuai dengan kemampuannya.

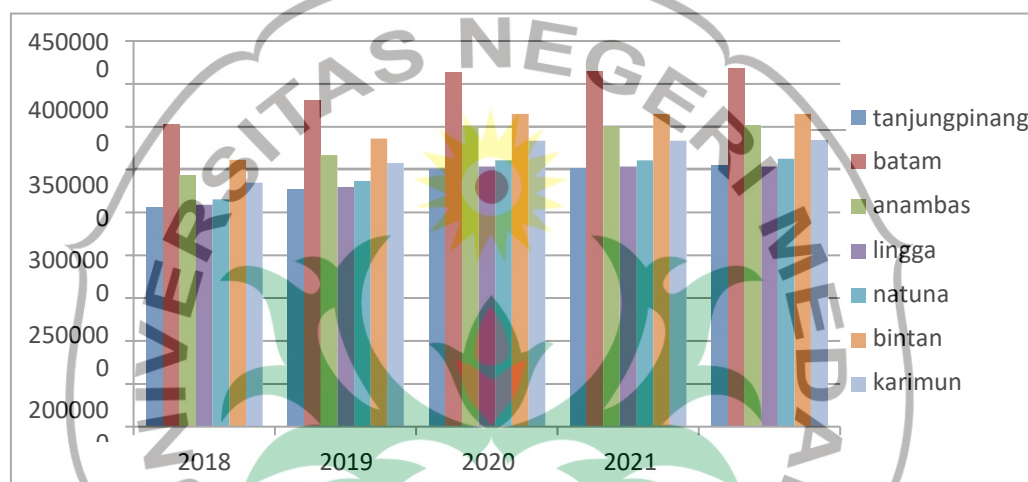
Namun setiap peningkatan upah minimum akan menyebabkan peningkatan upah pada seluruh pegawai dalam perusahaan. Yang artinya semakin banyak pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi upah minimum akan menyebabkan meningkatnya biaya operasional dari perusahaan, peningkatan biaya operasional yang tidak diimbangi oleh peningkatan pada output produksi akan membebani dan mengurangi return perusahaan, dan perusahaan akan mencari cara untuk menutupi kekurangan tersebut dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja agar perusahaan dapat mengembalikan keseimbangan antara biaya produksi dan pendapatan. Penetapan upah di setiap wilayah berbeda-beda sesuai yang berdasarkan tentang persyaratan untuk Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas suatu daerah. Pada dasarnya Provinsi Kepulauan Riau mempunyai upah minimum yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain.

Sehingga perusahaan dapat memberikan dampak positif dan dapat berdampak negatif, jika perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi upah sesuai dengan ketentuan pemerintah menyebabkan perusahaan melakukan PHK sehingga tingkat pengangguran akan semakin tinggi. Berikut ini merupakan grafik upah pada

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018- 2022

Gambar 1. 4

Upah Minimum Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2022

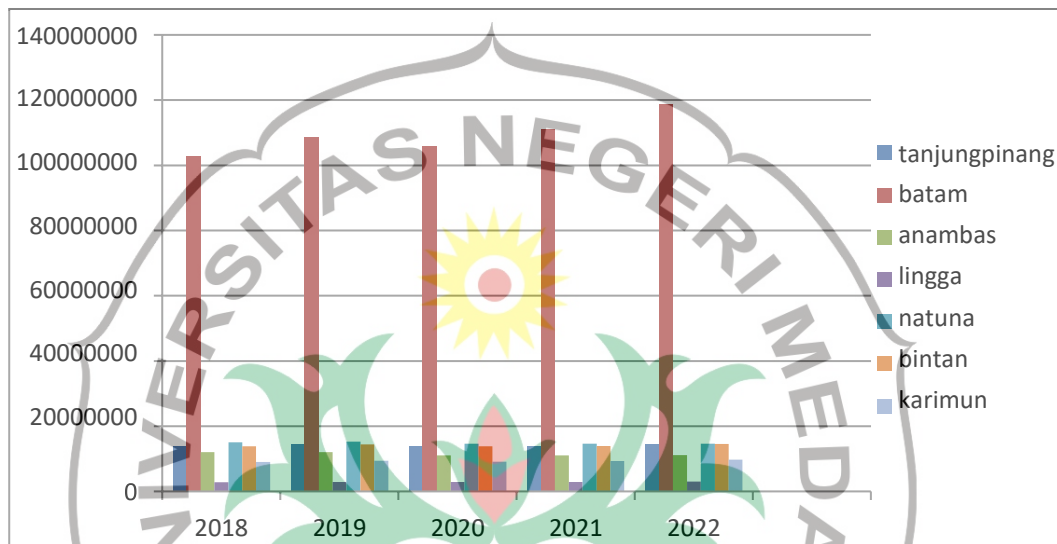
Grafik di atas menunjukkan tingkat upah minimum kabupaten Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2018-2022. Kepulauan Riau sendiri memiliki tingkat upah yang tertinggi ke 9 di Indonesia, sementara kota dengan upah tertinggi di Kepulauan Riau adalah batam dan terendah lingga, namun secara keseluruhan setiap kabupaten/kota mengalami peningkatan upah setiap tahunnya. Penambahan upah justru diikuti oleh pengangguran yang berfluktuasi namun cenderung bertambah.

Dalam penelitian terdahulu oleh Amngi Filiasari dan Achma Hendra Setiawan (2021) menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel Tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan pada penelitian Rima Eka Kurnia dan Yustirani Septiani (2021) menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten tidak berpengaruh terhadap variabel pengangguran .

Faktor lain yang mempengaruhi pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator yang menunjukkan kemajuan ekonomi suatu daerah yaitu dinyatakan dengan tingginya PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto yang juga berdampak pada tingkat pengangguran. Produk domestik regional bruto adalah ukuran pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang ditentukan dengan harga dasar berlaku serta dasar harga konstan. Hukum okun yang dikemukakan Arthur okun menyatakan bahwa apabila terjadi penurunan produk bruto sebanyak 2% maka secara tidak langsung telah meningkatkan presentase tingkat pengangguran. Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga aktual pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dikenal sebagai produk domestik regional berdasarkan harga konstan. Indikator yang digunakan yakni produk domestik regional bruto adalah peningkatan ekonomi dalam produksi barang dan jasa pada daerah karena data regional.

Hal ini berarti Produk domestik regional bruto memiliki dampak terhadap angkatan kerja, dengan kata lain jika Pertumbuhan ekonomi naik maka output yang diproduksi dalam suatu wilayah menjadi bertambah, dengan bertambahnya jumlah output yang diproduksi maka secara tidak langsung akan membuka lowongan tenaga kerja atau dapat mengurangi pengangguran. Sehingga terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang timbal balik dengan angka pengangguran. Produk domestik regional bruto yang pada dasarnya diharapkan untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas pada kenyataannya berbanding terbalik. Berikut ini merupakan grafik pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2022

Gambar 1. 5

Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Kepri Tahun 2018-2022

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2022

Grafik di atas menunjukkan Produk domestik regional bruto dengan harga konstan di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2018 hingga 2022. Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau dengan PDRB tertinggi adalah Kota Batam hingga mencapai Rp.118.665.208,17 juta pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh karena banyaknya industri di Kota Batam serta pariwisata hal ini disebabkan juga salah satunya karena letaknya yang strategis sehingga menjadi kota perdagangan bebas pajak dan mampu menarik investor untuk berinvestasi, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Batam dapat maju dengan pesat. Namun Lingga yang menjadi kabupaten dengan PDRB terendah bahkan hanya mencapai Rp.2.914.596,87 Juta pada tahun 2020. Hal ini tidak sinkron menggunakan teori Okun yang menyatakan bahwa setiap penurunan 2% PDRB maka akan menaikkan lebih kurang 1% angka pengangguran sehingga disimpulkan bahwa angka pengangguran mempunyai hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. sehingga apabila pertumbuhan ekonomi semakin tinggi maka akan dapat menurunkan angka pengangguran.

Dalam penelitian terdahulu oleh Dwi Mahroji dan Saiful Anwar (2020) menunjuk hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap pengangguran, sementara dalam penelitian terdahulu oleh Amngi Filiasari dan Achma Hendra Setiawan (2021) menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran.

Terjadi peningkatan PDRB antar daerah, dan peningkatan PDRB ini tidak selalu menyebabkan penurunan angka pengangguran, seperti yang terjadi di Kota Batam pada tahun 2020 hingga tahun 2022 yang PDRB-nya meningkat sedangkan angka pengangguran masyarakat juga meningkat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pengangguran, termasuk pendidikan, upah dan produk domestik regional bruto. Angka pengangguran di Kepulauan Riau dinilai tinggi karena berada di atas rata-rata, dan hal ini tidak tepat karena PDRB yang tinggi yang seharusnya bisa mengurangi angka pengangguran malah tidak terjadi. Hal inilah yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, peningkatan pertumbuhan ekonomi justru diimbangi dengan peningkatan pengangguran. Pembuktian tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau karena dilihat bahwa kaya akan industri dan pariwisata sehingga mampu menaikkan ekonomi suatu daerah. Penelitian sebelumnya berada pada Provinsi Banten pada tahun 2002-2018.

Berdasarkan uraian tersebut ingin mengetahui lebih jauh tentang variabel yang berfungsi mempengaruhi pada tingkat pengangguran Provinsi Kepulauan Riau. Maka dengan adanya ketertarik terhadap penelitian sebelumnya maka mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendidikan, Upah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Kepulauan Riau 2018- 2022”**

B. Identifikasi Masalah

Dengan mempertimbangkan fenomena yang disebutkan di atas, adapun masalah-masalah berikut dapat diidentifikasi :

1. Tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau terhitung cukup tinggi hingga pernah mengapai peringkat terbanyak di Indonesia Agustus 202.
2. Provinsi Kepulauan Riau memiliki produk domestik regional bruto yang cukup tinggi namun diikuti juga dengan pengangguran yang tinggi.
3. Tingkat pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau masih minim sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran.
4. Upah minimum di Provinsi Kepulauan Riau selalu mengalami peningkatan namun pengangguran juga bertambah

C. Batasan Masalah

Tergantung pada konteks dan identifikasi masalah, Penelitian ini akan dibatasi pada pertanyaan pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau dan berbagai faktor terkait tahun 2018-2022. Beberapa faktor terkait tersebut ialah tingkat pendidikan, upah minimum kabupaten dan pertumbuhan ekonomi. Variabel-variabel ini berasal dari berbagai faktor yang dapat berdampak pada pengangguran, termasuk populasi, upah minimum, inflasi, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan kurangnya informasi atau keterampilan yang mencegah pekerjaan. Namun, hanya tiga faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pada tingkat pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang relatif rendah, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang mampu mengurangi pengangguran. Kemajuan perekonomian Provinsi

Kepulauan Riau juga dibuktikan dengan adanya kota industri dan kota wisata sehingga peneliti ingin mengetahui dampak upah minimum di wilayah tersebut yang merupakan provinsi peringkat ke-9 dengan tingkat upah tertinggi di Indonesia. Peneliti mengambil tahun penelitian yakni tahun 2018-2022, Untuk menentukan apakah sejumlah variabel, seperti rata-rata lama sekolah, upah minimum kabupaten dan produk domestik regional bruto yang dapat berdampak pada tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau. untuk itu penelitian ini menganalisis data tahun 2018 – 2022. Variabel dependen penelitian tersebut adalah tingkat pengangguran dan variabel independent pendidikan, upah dan pertumbuhan ekonomi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 hingga tahun 2022 ?
2. Bagaimana pengaruh upah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 hingga tahun 2022 ?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 hingga tahun 2022 ?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, upah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 hingga tahun 2022 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 sampai dengan tahun 2022
2. Untuk mengetahui pengaruh upah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Riau tahun 2018 hingga tahun 2022
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 hingga tahun 2022
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, upah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 sampai dengan tahun 2022

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, sebagai berikut :

1) Bagi Masyarakat

Ini berfungsi sebagai salah satu sumber daya masyarakat untuk mencari tahu bagaimana menurunkan pengangguran dengan memahami variabel-

variabel yang mempengaruhi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini seharusnya memberikan ide-ide pemerintah untuk mengembangkan kebijakan tentang penyebab yang mempengaruhi pengangguran di provinsi Kepulauan Riau

3) Bagi peneliti dan peneliti selanjutnya

Bagi penulis, skripsi ini dilakukan sebagai cara untuk menunjukan ilmu yang di peroleh selama kuliah dan bagi penulis selanjutnya ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam penelitian selanjutnya di masa depan.

4) Bagi Universitas Negeri Medan

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi tambahan koleksi Pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa Universitas Negeri Medan Khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi.